

Strategi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu

¹M. Mukhlis, ²Zaili Rusli, ³Dadang Mashur

^{1,2,3}Universitas Riau

Korespondensi : mukhlis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam. Hasil penelitian Strategi pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil dalam peningkatan SDM nelayan ,pembangunan infrastruktur dasar dan faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa dengan menggunakan analisis SWOT adalah berada pada kuadran I yaitu menghasilkan strategi SO. strategi SO mendukung kebijakan agresif yang mana strategi agresif dapat mendukung organisasi untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus maju.

Kata kunci: Strategi, Dana Desa, Kepenghuluan, Pemanfaatan

Abstract

This research aims to determine the strategies and factors inhibiting the development of the Kubu Hulu River District through the use of village funds. The research uses qualitative methods with a case study approach. A case study is research in which the researcher explores a particular phenomenon (case) at a certain time and activity (program, event, process, institution, or social group) and collects detailed and in-depth information. Research results Strategy for development of the Kubu Hulu River Headwaters through the use of village funds including community economic empowerment, food security, training activities and empowerment of small fishermen in improving fishermen's human resources, development of basic infrastructure and factors inhibiting the development of the Kubu Hulu River Headwaters through the use of village funds using SWOT analysis is in quadrant I, namely producing an SO strategy. SO strategy supports aggressive policies where aggressive strategies can support the organization to continue to maximize existing strengths and opportunities to continue moving forward.

Keyword: Strategy, Village Funds, Leadership, Utilization

1. PENDAHULUAN

Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagansiapiapi, kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 637.161 jiwa (2021). Penduduk aslinya adalah suku Melayu Rokan Hilir. Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 159 desa. (Kabupaten rokaan hilir dalam angka 2021 www.rohilkab.bps.go.id. hlm. 48).

Selanjutnya setelah pembentukan Kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014, maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir

menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, yakni: Kecamatan Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah, Pujud, Simpang Kanan, Pasir Limau Kapas, Batu Hampar, Rantau Kopar, Pekaitan, Kubu Babussalam, Balai Jaya, Bagansinembah Raya dan Tanjung Medan

Dari 18 kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hilir, kecamatan kubu sudah memulai Usaha-usaha pembangunan di berbagai bidang yang memerlukan data statistik yang akurat, tepat waktu, teratur, dan berkesinambungan untuk menunjang perencanaan yang tepat, pengontrolan dan pengendalian yang cermat, serta evaluasi yang kritis terhadap hasil pembangunan yang dicapai. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan di kecamatan kubu, pemerintah pusat menggulirkan program Dana Desa. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan dana desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa, dan kemasyarakatan. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016.

Dana Desa merupakan amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka oleh sebab itu pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu unsur percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa setempat . (<https://www.kemenkeu.go.id/2021>).

Adapun penetapan prioritas dana desa 2021 berdasarkan permendesa pdtt 13 tahun 2020 sebagai berikut:

a. kewenangan desa

1. Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
2. Apabila desa tidak memiliki peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka Desa tetap dapat menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

b. swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

c. Padat karya tunai desa

1. Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD),

2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya,
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD,
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari,
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD, dan

Selanjutnya, adapun Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :

- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
- b. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan,
- c. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain, dan
- d. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- e. Restoran dan wisata Desa
- f. Perdagangan logistik pangan
- g. Pemeliharaan bangunan pasar,
- h. Badan usaha milik desa. (Permendesa PDTT 13 Tahun 2020)

Infrastruktur di desa, seperti: sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi dan komunikasi harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa menjadi berkembang dan maju. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan meliputi:

- (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan,
- (2) pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan geografisnya,
- (3) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa,
- (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa,
- (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan,
- (6) pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota,
- (7) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan. (www.bappenas.go.id diakses 04 Maret 2021)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan amanat penerimaan Dana Desa untuk setiap desa se Indonesia, dana desa tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum dana desa digunakan seluruh kegiatan baik pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, seluruh perencanaan harus masuk dalam dokumen perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan

berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Adapun proses penyaluran Dana Desa dari Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan kepada pemerintah desa dapat dilihat dari alur penyaluran Dana Desa di bawah ini:



Gambar 1.1. Alur Penyaluran Dana Desa

Sumber: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/profil/sejarah/114-profil.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

Dari alur di atas dapat dilihat bahwa pemerintah desa harus berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten melalui DPMD dan BKAD agar proses penyaluran Dana Desa berjalan lancar hingga Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Selanjutnya, tahapan penyaluran Dana Desa dibagi ke dalam beberapa periodisasi penyaluran, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1.2. Tahapan Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa

Sumber: <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/profil/sejarah/114-profil.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

Selanjutnya ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. kurangnya konsistensi regulasi dan sinergitas antara Kementerian terkait;
2. lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di desa;
3. lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa;
4. minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa.
5. Masih adanya batasan-batasan dalam menggunakan dana desa dalam pembangunan desa.
6. Pemanfaatan dana desa tidak bisa digunakan untuk gaji aparat desa.

Berdasarkan beberapa faktor diatas permasalahan yang sering terjadi ini terkait dengan pelayanan publik yang menjadi penghambat percepatan pembangunan kepenghuluan sungai kubu hulu dengan pemanfaatan dana desa. Selain itu juga masih adanya batasan-batasan pembangunan yang boleh atau tidak dibangun dengan cara memanfaatkan dana desa. Misalnya, seperti pembangunan jalan yang statusnya jalan kabupaten walaupun kondisi jalan tersebut rusak parah dan menjadi satu-satunya jalan penghubung antar desa tidak bisa dibangun dengan menggunakan dana desa.

Selanjutnya, penelitian ini terletak di Kecamatan Kubu dengan jumlah penduduk 27.230 jiwa yang terdiri dari 13.160 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 14.070 jiwa berjenis kelamin perempuan, tersebar di 9 (sembilan) Kepenghuluan dan 1 (satu kelurahan). Salah satu kepenghuluan yang memanfaatkan dana desa dalam pembangunan desa yaitu kepenghuluan sungai kubu hulu, yang merupakan desa hasil pemekaran dari Kepenghuluan Sungai Kubu atau yang lebih dikenal dengan Kepenghuluan Sungai Kubu Induk yaitu pada tahun 2012. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat maka tokoh masyarakat wilayah Sungai Kubu memperjuangkan pembentukan kepenghuluan melalui proses pemekaran kepenghuluan.

Tabel IV. 1 Pagu Dana Kepenghuluan Tahun 2020-2021 Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Kec	IdDesa	Desa	DK Tahun 2020	DK Tahun 2021
1	KUBU	1407012002	Tanjung Leban	782,736,000	827,140,000
2	KUBU	1407012003	Sungai kubu	856,578,000	851,129,000
3	KUBU	1407012004	Rantau panjangkan	751,191,000	772,211,000
4	KUBU	1407012012	Teluk piyai	1,042,710,000	1,053,390,000
5	KUBU	1407012013	Sungaisegajah	800,461,000	804,409,000
6	KUBU	1407012015	Sei Segajah Makmur	767,394,000	769,650,000
7	KUBU	1407012020	Telukpiyai Pesisir	1,242,411,000	1,266,892,000
8	KUBU	1407012021	Sungaikubu Hulu	812,031,000	845,314,000
9	KUBU	1407012022	Sungai Segajah Jaya	778,224,000	803,684,000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Rokan Hilir

Sebelum pemekaran, Kepenghuluan Sungai Kubu yang merupakan Kepenghuluan yang tertua dalam sejarah berdirinya Kubu, Untuk pembagian wilayahnya dibagi menjadi 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Karya, Dusun Datuk Kancil, Dusun Beringin, Dusun Sepakat dan Dusun Mekar. Pada tahun 2012 Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu di sah kan oleh Bupati Rokan Hilir sebagai Kepenghuluan pemekaran yang merupakan Kepenghuluan persiapan, sebagai kepenghuluan pemekaran pada saat itu Sungai Kubu Hulu memiliki : Luas : 8.60 km² terdiri dari 6 (Enam) Kepala Dusun , 8 (Delapan) Ketua RW dan 19 (Sembilan belas) Ketua RT. Dengan jumlah penduduk 1.842 jiwa terdiri dari 486 KK. Pada tahun 2016 Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Resmi menjadi Kepenghuluan definitif.

Selanjutnya, terkait perencanaan pembangunan kepenghuluan yang merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kepenghuluan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kepenghuluan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepenghuluan. Agar Tujuan pembangunan kepenghuluan benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan kepenghuluan hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit kepenghuluan, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat kepenghuluan tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Berikut ada beberapa poim yang menjadi permasalahan terkait sarana dan prasarana di kepenghuluan sungai kubu hulu. Masalah Kepenghuluan adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kepenghuluan dan pemerintahan kepenghuluan berdasarkan hasil pengkajian keadaan kepenghuluan dengan menggunakan 3 (tiga) tools Participatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Kepenghuluan, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan. Berikut Permasalahan secara umum kepenghuluan sungai Kubu Hulu dalam bidang infrastruktur desa/sarana prasarana :

1. Masih banyak jalan kepenghuluan yang belum memadai seperti halnya berupa jalan tanah sehingga menghambat arus barang dan jasa;
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai ;
3. Kebutuhan akan Box Culvert dan Gorong-Gorong belum terpenuhi ;
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial ;

5. Drainase dan saluran air yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir ;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan ;
7. Kemampuan kader kepenghuluan mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai;
8. Belum adanya Pasar Desa/Kepenghuluan;
9. Kapasitas tenaga ahli di bidang pembangunan belum, memadai.

Dengan adanya beberapa permasalahan diatas terkait sarana dan prasarana dikepenghuluan sungai kubu hulu sangat memerlukan pemanfaatan dana desa agar terjadinya pembangunan yang berkelanjutan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. (Creswell dan Wahyuningsih, 2013)

Peneliti memilih kualitatif karena dianggap lebih relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dan berusaha menggambarkan bagaimana strategi pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan desa yang terletak di kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penentuan informan ini penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan analisis SWOT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kepenghuluan Sungai Kubu Hulu

Menurut Sumpeno (2011) strategi pembangunan desa dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Strategi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil dalam peningkatan SDM nelayan ,pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas agar masyarakat dapat mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa

Menurut (Warouw, M., Rengkung, R. L., & Pangemanan, P. A. 2015) Ada lima faktor yang mendasar yang bisa mempengaruhi proses pembangunan di desa yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pelayanan public dan partisipasi masyarakat. Analisis SWOT merupakan suatu teknik untuk penyusunan strategi baik perusahaan maupun organisasi dengan menganalisis beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal. Menurut (Rangkuti, 2016) analisis SWOT yaitu: dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktivitas memerlukan suatu perencanaan strategis yaitu suatu pola atau struktur yang saling mendukung dan melengkapi menuju kearah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan

perencanaan agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran, sehingga tersusun program-program yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi, salah satu analisis yang cukup populer di kalangan pelaku organisasi maupun perusahaan adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT juga mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Oleh karena itu, analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan eksternal yang mana Analisis SWOT terdiri dari (*S*) *Strengths*, (*W*) *Weaknesses*, (*O*) *Opportunities*, dan (*T*) *Threats* yang mana *Strengths* adalah kekuatan, *Weaknesses* adalah kelemahan yang termasuk bagian dari lingkungan internal, sedangkan *Opportunities* adalah Peluang serta *Threats* adalah ancaman yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal.

Didalam strategi pembangunan Kepenghuluan sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa harus melihat berbagai faktor internal dan eksternal agar dapat mengoptimalkan pengembangan pembangunan desa di kepenghuluan sungai kubu hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penyusunan strategi ini, dilakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian ditentukan faktor internal dan eksternal.

Untuk mewujudkan strategi pembangunan di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Berikut ini hasil penelitian dari hasil analisa SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktor SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada pemerintah desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Faktor-Faktor SWOT

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Merupakan suatu potensi keunggulan/kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah kepenghuluan sungai kubu hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

- a. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan desa yaitu aktif masyarakat dalam kegiatan desa berarti bahwa warga desa secara proaktif dan antusias berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- b. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dengan kepemimpinan yang kuat dan visioner, Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pemimpin desa yang kuat dan visioner mampu mengarahkan desa menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan.
- c. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah secara bijaksana dan berkelanjutan, Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- d. Infrastruktur dasar yang memadai di kepenghuluan sungai Kubu Hulu, infrastruktur dasar yang memadai menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung aktivitas keseharian dan pembangunan ekonomi masyarakat. Jalan desa yang telah diperbaiki dan dirawat dengan baik memudahkan akses transportasi, baik bagi warga desa maupun bagi pengunjung yang datang ke desa. Selain itu, fasilitas seperti jaringan air bersih yang mencukupi, serta sistem irigasi yang memadai, memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara lebih produktif.
- e. Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal kerjasama yang baik dengan pihak eksternal menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan dan kemajuan desa. Pemerintah desa secara aktif menjalin hubungan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah (NGO), serta sektor swasta. Kerjasama ini memungkinkan desa

untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

- f. Keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan merupakan prinsip yang dipegang teguh demi mencapai akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran, baik dari dana desa maupun sumber lainnya, diinformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti rapat desa, papan pengumuman, dan media sosial. Laporan keuangan disusun secara berkala dan dapat diakses oleh seluruh warga, memberikan gambaran yang transparan tentang pendapatan dan pengeluaran desa. Selain itu, musyawarah desa rutin diadakan untuk membahas rencana anggaran dan penggunaannya, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan
- g. Dukungan dari pemerintah kabupaten dukungan dari pemerintah kabupaten memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan dan kemajuan desa. Pemerintah kabupaten memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pendanaan hingga bimbingan teknis, yang memungkinkan desa untuk mengimplementasikan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan dari pemerintah kabupaten digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, yang meningkatkan kualitas hidup warga desa. Selain itu, pemerintah kabupaten juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membantu mereka meningkatkan produktivitas dan keterampilan.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki pemerintah kepenghuluan sungai kubu hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih rangny sumber daya manusia yang terlatih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Banyak warga desa yang masih belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga kemampuan mereka untuk mengelola usaha, mengadopsi teknologi baru, atau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa menjadi terbatas.
- b. Infrastruktur teknologi yang terbatas nfrastruktur teknologi masih terbatas, membatasi akses penduduk lokal terhadap layanan dan informasi digital. Keterbatasan ini menghambat kemajuan ekonomi dan sosial, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di desa ini, sehingga penduduk dapat lebih terhubung dengan dunia luar dan memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c. Kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh penduduk lokal. Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses terbatas terhadap informasi dan pelatihan, potensi penduduk desa untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial dapat terbatas.
- d. Manajemen administrasi yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang menghambat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan, kesulitan dalam pemantauan program pembangunan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penting untuk memperbaiki manajemen administrasi di desa ini melalui peningkatan kapasitas, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan praktik manajemen yang baik. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah Rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, lingkungan, dan pengetahuan akan teknologi. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, kesempatan kerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
- f. Terbatasnya anggaran untuk program pengembangan Dengan anggaran yang terbatas, pelaksanaan program pembangunan menjadi terhambat, sehingga mempengaruhi kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa. Selain itu, terbatasnya anggaran juga berpotensi mengurangi ketersediaan layanan publik yang berkualitas dan memadai bagi penduduk desa. Diperlukan strategi yang inovatif dan efisien dalam pengelolaan anggaran agar dapat memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu.
- g. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu menjadi salah satu masalah yang perlu segera diatasi. Meskipun bantuan tersebut penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun ketergantungan yang berlebihan dapat menghambat upaya mandiri dan inovasi dalam pengembangan desa.
- h. Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan desa Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan desa di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu menjadi masalah serius yang dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam upaya pembangunan. Pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, terbatasnya kesempatan, motivasi, dan ruang partisipasi bagi pemuda di desa ini dapat mengakibatkan minimnya kontribusi mereka dalam pembangunan desa.

3. Peluang (*Opportunities*)

Merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kepenghuluan sungai kubu hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

- a. Potensi pengembangan pariwisata lokal Kepenghuluan sungai Kubu Hulu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata lokal yang menarik. Keindahan alamnya yang masih alami, sungai yang jernih, serta keberagaman flora dan fauna menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik. Selain itu, kearifan lokal dan budaya masyarakat yang ramah juga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dengan pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan,
- b. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong pembangunan di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu. Melalui kebijakan yang mendukung, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, pemerintah dapat memberikan dorongan yang besar bagi kemajuan desa ini. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata lokal, pelatihan keterampilan untuk masyarakat, serta program-program pemberdayaan ekonomi juga dapat memberikan dampak positif
- c. Kemitraan dengan sektor swasta Melalui kemitraan ini, Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta juga dapat membuka peluang investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.
- d. Peningkatan akses terhadap teknologi dan internet engan akses yang memadai, masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan luas, berkomunikasi dengan lebih efektif, serta memanfaatkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, akses terhadap teknologi dan internet juga membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti e-commerce dan pemasaran digital produk lokal.

- e. Potensi pasar untuk produk local Keunikan produk lokal, seperti hasil pertanian organik, kerajinan tangan, serta makanan dan minuman tradisional, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan local. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk lokal ini dapat diperkenalkan ke pasar yang lebih luas, seperti pasar online dan event-event khusus yang menonjolkan produk lokal.
 - f. Program pelatihan dan pendidikan dari lembaga eksternal Program pelatihan dan pendidikan dari lembaga eksternal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas
 - g. Adanya dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengembangkan potensi desa secara keseluruhan. Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan sarana pendidikan dan kesehatan, yang akan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Selain itu, dana desa juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas lembaga desa.
 - h. Kerjasama dengan universitas untuk penelitian dan pengembangan Kerjasama dengan universitas untuk penelitian dan pengembangan di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat memberikan manfaat yang besar dalam mengidentifikasi potensi dan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa.
4. Ancaman (*Threats*)
- Merupakan komponen atau hal yang dapat menjadi penghambat dalam pengembangan SDM pemerintah kepenghuluan sungai kubu hulu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir :
- a. Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat desa. Misalnya, pemotongan anggaran untuk program-program pembangunan, penurunan subsidi untuk pertanian, atau kebijakan lingkungan yang memberatkan bagi petani local
 - b. Bencana alam yang sering terjadi Kepenghuluan sungai Kubu Hulu sering mengalami bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Banjir dan tanah longsor terjadi terutama pada musim hujan akibat tingginya curah hujan dan kerapuhan lahan. Sementara itu, kekeringan sering terjadi pada musim kemarau panjang, mengakibatkan krisis air bersih dan kesulitan dalam pertanian.
 - c. Tingkat persaingan yang tinggi dengan desa lain Persaingan ini mungkin terjadi dalam berbagai aspek, seperti dalam pemasaran produk lokal, penarikan investasi, atau pengembangan pariwisata. Untuk mengatasi persaingan ini, diperlukan strategi yang cerdas dan inovatif untuk membedakan Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dari desa-desa lain, seperti dengan mengembangkan produk unggulan yang berbeda atau menawarkan pengalaman pariwisata yang unik.
 - d. Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika desa terlalu bergantung pada sektor pertanian atau pariwisata saja, maka fluktuasi harga atau musim dapat berdampak besar pada ekonomi desa secara keseluruhan.
 - e. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjuangkan kepentingan Kepenghuluan sungai Kubu Hulu kepada pemerintah pusat, serta mengembangkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah pusat. Melalui komunikasi yang efektif dan advokasi yang kuat, diharapkan Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapinya.

- f. Peningkatan harga bahan pokok eningkatan harga bahan pokok di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat menjadi beban yang berat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga membatasi akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
- g. Masalah kesehatan masyarakat Masalah kesehatan masyarakat di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu menjadi perhatian utama karena dapat berdampak pada kualitas hidup penduduk dan pembangunan desa secara keseluruhan. Beberapa masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat desa meliputi akses terbatas terhadap layanan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, serta sanitasi yang buruk
- h. Pengaruh budaya luar yang negatif Pengaruh budaya luar yang negatif di Kepenghuluan sungai Kubu Hulu dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat. Masuknya budaya luar yang negatif, seperti gaya hidup tidak sehat, konsumerisme berlebihan, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda.

4. KESIMPULAN

Strategi pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil dalam peningkatan SDM nelayan ,pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas agar masyarakat dapat mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Hasil penyusunan faktor-faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa dengan menggunakan analisis SWOT adalah berada pada kuadran I yaitu menghasilkan strategi SO. strategi SO mendukung kebijakan agresif yang mana strategi agresif dapat mendukung organisasi untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus maju. Strategi tersebut diantaranya. *Pertama*, Memanfaatkan kesadaran tinggi masyarakat dalam mengadakan pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan desa. *Kedua*, Kepemimpinan yang kuat dan visioner tujuan mengembangkan rencana strategis desa yang selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan maksimal. *Ketiga*, Ketersediaan sumberdaya Alam melimpah untuk Mendukung Program pemerintah dalam konservasi dan pengelolaan melibatkan masyarakat dalam program pemeliharaan hutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan Menggunakan dana desa dan bantuan pemerintah untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti pusat konservasi, tempat pembibitan tanaman, dan fasilitas pengolahan limbah. *Keempat*, menggunakan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan seperti membentuk kemitraan dengan universitas untuk penelitian dan pengembangan program pemberdayaan yang berbasis ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- [2] Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1-11.
- [3] Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- [5] Daniel susilo, mohammad roesli, konsepsi kekuasaan legislasi presiden dalam undang-undang dasar 1945 , (2018) *mimbar yustitia*: vol 2 no 2.
- [6] Hariadi (2005) *perumusan strategi lingkungan* Jakarta .
- [7] *Jurnal Bina Praja* (2012) . Volume 4 No. 3
- [8] *jurnal politikologi* (2016) . vol. 3 no. 1
- [9] *Jurnal Paradigma Ekonomika* (2011) Vol.1, No.4.
- [10] Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam ProsesPengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- [11] Muluk, M.R Khairul. (2016).. *The New Public dan Pemerintahan Local Partisipatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- [12] Muhlis madani, (2011). *dimensi intraksi actor dalam proses perumusan kebijakan public.:* graha ilmu. Yogyakarta.
- [13] Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik: formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- [14] Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [15] Rangkuti, Freddy. 2004. *The Power of Brand*. , Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [16] Ramdhani & Ramdhani *Jurnal Publik* (2017).Vol. 11; No. 01
- [17] Sugiman , *administrasi pemerintahan* (2018). Vol. 7 No. 1
- [18] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ed-24). Bandung: Alfabeta.
- [19] Soenarko. (2000). *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [20] Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [21] Suharto, Edi(2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- [22] Tangkilisan, Hessel Nogi . 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Alfabeta
- [23] Wahyuningsih. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS
- [24] Warouw, M., Rengkung, R. L., & Pangemanan, P. A. (2015). Kajian Faktor-faktor dalam proses pembangunan desa di era otonomi daerah di kecamatan Sinonsayang. *Agri-Sosioekonomi*, 11(2A), 13-20.